

## **Akuntabilitas Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) terhadap program jambanisasi di Kelurahan Jangli Kota Semarang**

**Hikmia Rahadini Pradipta**

Universitas Diponegoro, Jl. Imam Bardjo, SH, No. 1 Semarang, Jawa Tengah, Indonesia

Email: [miarahadini@gmail.com](mailto:miarahadini@gmail.com)

Naskah diterima: 8/1/2022; Revisi: 15/3/2022; Disetujui: 13/4/2022

### **Abstrak**

Peran LSM sangat membantu bagi pemerintah dalam melaksanakan program-programnya, khususnya program jambanisasi di Kelurahan Jangli. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perencanaan dan implementasi yang tepat untuk program Jambanisasi di Kelurahan Jangli tahun 2018. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pengumpulan data melalui komunikasi, dokumentasi dan observasi. Wawancara dilakukan terhadap aktor kunci dari masing-masing aktivitas untuk mendukung terjadinya kebijakan, aktor tersebut yaitu Ketua LSM, Koordinator Lapangan, Ketua RT Kelurahan Jangli, Warga Jangli sebagai penerima jamban yang sudah jadi dan Warga Jangli sebagai penerima jamban yang belum jadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat warga Semarang yang belum mempunyai jamban, salah satunya warga yang bermukim di Kelurahan Jangli. Masih terdapat banyak warga yang membuang kotoran di sungai dan hutan sehingga hal itu menimbulkan pencemaran pada air sungai dan udara. Dari keadaan tersebut sehingga memunculkan inisiatif dari Pemerintah Kota Semarang untuk menangani kasus tersebut dengan diadakannya pembagian jamban air. Hal ini juga ditunjukkan keinginan untuk menjadikan masyarakat hidup sehat. Permasalahan muncul ketika dilapangan ternyata yang terjadi banyaknya jamban dan plat yang terbungkalai. Dimana akuntabilitas LSM terhadap program jambanisasi dapat dikatakan belum maksimal berhasil. Selain itu faktor lain dari kegagalannya program jambanisasi ini ialah salah satunya peran masyarakat dalam program tersebut juga tidak aktif, dimana sebagian banyak masyarakat setempat yang tingkat kepeduliannya masih sangat rendah. Sedangkan dari pihak pemerintah sendiri pun juga masih minimnya kontrol secara nyata terhadap program tersebut sehingga tidak adanya evaluasi bertahap terhadap program ini.

**Kata kunci:** *Akuntabilitas; LSM; Pembangunan.*

### ***Non Government Organization (NGOs) Accountability for Latrine Program in Jangli, Semarang City***

### ***Abstract***

*The role of NGOs is very helpful for the government in implementing its programs, especially the latrine program in Jangli. This study aims to determine the appropriate planning and implementation for latrine program in Jangli in 2018. This research was conducted using a qualitative descriptive method. Collecting data through communication, documentation and observation. Interviews were conducted on key actors from each activity to support the policy, the actors were the Head of the NGO, Field Coordinator, Head of RT Jangli, Jangli residents as*

*recipients of ready-made latrines and Jangli residents as recipients of unfinished latrines. The results showed that there were still Semarang residents who did not have latrines, one of which was residents who lived in Jangli. There are still many residents who throw their waste in rivers and forests so that it causes pollution to river water and air. From this situation, the Semarang City Government took the initiative to handle the case by distributing water latrines. It is also aimed at the desire to make people live healthy lives. Problems arise when in the field it turns out that there are many abandoned latrines and plates. Where the accountability of NGOs to the latrine program can be said to have not been maximally successful. In addition, another factor in the failure of the latrine program is that one of the roles of the community in the program is also not active, where most of the local people whose level of awareness is still very low. Meanwhile, from the government itself, there is still a lack of real control over the program so that there is no gradual evaluation of this program.*

**Keywords:** *accountability; NGOs; development.*

## **Pendahuluan**

Masalah pembangunan di Indonesia merupakan masalah yang tidak mudah diatasi. Adanya kesenjangan ekonomi dan sosial yang signifikan dalam kehidupan masyarakat Indonesia, menjadi tugas besar bagi pemerintah dalam mengatasi masalah tersebut. Pemerataan pembangunan merupakan pekerjaan yang harus dilakukan oleh pemerintah karena dengan pemerataan pembangunan dapat mempermudah pemerintah dan masyarakat dalam menjalani kehidupan. Pembangunan di Indonesia merupakan wujud dari pelaksanaan NKRI yang telah tercantum pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4 yaitu memajukan kesejahteraan umum. Memajukan kesejahteraan umum merupakan kewajiban bagi pemerintah, di mana pemerintah menjamin kesejahteraan masyarakat salah satunya melalui program pembangunan. Kesejahteraan yang dimaksud bukanlah semata-mata pada materiil saja melainkan non-materiil juga perlu diperhatikan. Sehingga pembangunan yang dilakukan sebagai wujud untuk memajukan kesejahteraan umum yang tidak hanya menyangkut kesejahteraan pada fisik saja, melainkan pada batin juga. Untuk mencapai sebuah tujuan pembangunan, semua potensi alam harus digali, dikembangkan dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Demikian pula, mengingat potensi manusia dalam bentuk populasi yang besar, pengetahuan dan keterampilan perlu ditingkatkan untuk memungkinkan mereka menggali, mengembangkan, dan memanfaatkan potensi alam yang tersedia secara maksimal sehingga pelaksanaan program dapat terselenggara secara efektif dan efisien.

Setiap kecamatan di setiap kelurahan merencanakan dan melaksanakan berbagai rencana program pembangunan dalam bentuk pelaksanaan secara nasional. Keduanya diselenggarakan oleh pemerintah pusat melalui vertikal lokal dan pemerintah itu sendiri. Salah satu program pembangunan pemerintah yang dilakukan oleh masyarakat sendiri dan atau bersama dengan lembaga swadaya masyarakat lainnya yang melakukan program pembangunan berupa pemberdayaan masyarakat (Asnar, 2016). Agar program dan kegiatan pembangunan dapat berjalan baik maka diperlukan partisipasi dan peran dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Pencapaian tujuan pembangunan masing-masing instansi memerlukan gaya manajemen pembangunan yang bertujuan untuk memiliki rasa kebersamaan dan dapat menikmati pembangunan serta tujuan pembangunan lainnya dari program tersebut. Untuk mencapai tujuan tersebut antara lain diperlukannya kesadaran dan partisipasi aktif dari seluruh kalangan masyarakat dalam memajukan pembangunan. Selain itu,

diperlukan pula pembinaan dan pengarahan tata kelola masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan bersama. Program tersebut bukanlah kegiatan yang dilaksanakan pemerintah terhadap rakyatnya saja, melainkan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah bersama dengan seluruharganya.

Keterlibatan masyarakat merupakan salah satu sumber utama dalam upaya mencapai tujuan program pemerintah di negara kita. Suatu keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan tidak hanya terletak pada kinerja aparat pemerintah itu sendiri, tetapi juga upaya untuk menentukan kinerja dan keamanan masyarakat dalam melaksanakan program pembangunan. Kehadiran partisipasi masyarakat menyeimbangkan batas-batas pengeluaran publik dan sumber daya untuk pembangunan (Asnar, 2016).

Sehubungan dengan semakin tingginya tingkat pembangunan di daerah atau kecamatan dimaksimalkan apabila semua lapisan masyarakat berpartisipasi aktif, baik dalam hal menerima dan memberikan informasi, memberi masukan dan saran atas informasi yang diterima, perencanaan, dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan operasional pembangunan, menilai dan mengevaluasi hasil program pembangunan tersebut. Partisipasi sangatlah penting dalam suatu pembangunan, karena pembangunan merupakan kegiatan yang berkelanjutan. Dalam perkembangan yang demikian, diperlukan peran dan partisipasi masyarakat sekitar dalam kegiatan pembangunan, karena akan sulit untuk mengelola pembangunan tanpa adanya partisipasi dari seluruh masyarakat. Agar program serta kegiatan pembangunan dapat berjalan baik maka diperlukan selain partisipasi masyarakat, juga peran partisipasi dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) adalah organisasi masyarakat yang didasarkan pada kesamaan tujuan, pemikiran, kebutuhan, kepentingan, dan kegiatan pembangunan. Unerman (2000) mengemukakan bahwa peran LSM sendiri mempunyai peranan penting terkait pelayanan kepada warga sipil dengan pemerintah setempat dengan membantu segala masalah masyarakat termasuk kemiskinan merupakan salah satu masalah yang selalu diulang dalam era modern saat ini (Noviantoro & Nugroho, 2019). Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) adalah organisasi atau lembaga yang anggotanya warga Negara Republik Indonesia dan atas prakarsa sendiri atau sukarela, mempertimbangkan dan melaksanakan kegiatan tertentu yang ditentukan oleh organisasi atau lembaga sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam setiap hal. Upaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, yang ditujukan secara swadaya.

Suatu sistem sosial atau masyarakat yang memiliki peradaban (*civilization*), yang di dalamnya terdapat perkumpulan asosiasi orang-orang yang bersifat secara sukarela dan suatu jaringan hubungan dibangun atas dasar berbagai ikatan, tanpa memandang negara. Aktivitas publik sepenuhnya berasal dari masyarakat itu sendiri, dan negara hanyalah perantara. Dalam masyarakat sipil, akses publik terhadap lembaga-lembaga negara dijamin, yang berarti rakyat dapat bebas berpartisipasi dalam politik. Warga negara bebas untuk berkembang sepenuhnya dan mandiri di semua aspek kehidupan, termasuk dalam bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, dan bidang lainnya.

Lembaga Swadaya Masyarakat atau *Non-Government Organization* (NGOs) atau Organisasi Non-pemerintah (Ornop) dimana keberadaannya sangat mewarnai kehidupan perpolitikan di Indonesia. Saat ini terdapat lebih dari 10.000 LSM yang aktif di Indonesia di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota dan jumlah ini

diperkirakan akan terus meningkat setiap tahunnya. Perkembangan politik, demokrasi, perkembangan ekonomi dan kemajuan teknologi informasi merupakan faktor-faktor yang mendorong terus bertambahnya jumlah LSM di Indonesia. Menurut Gaffar (2002), LSM memainkan peran penting dalam kehidupan masyarakat dan melihatnya sebagai salah satu alternatif akan munculnya *civil society*. Hikam and Magnis-Suseno (1996) percaya bahwa LSM dapat memainkan peran penting dalam proses penguatan gerakan demokrasi melalui perannya dalam penguatan masyarakat sipil, yang perlu melalui berbagai kegiatan, seperti pendampingan, pembelaan dan penyadaran hati nurani. Berbicara tentang LSM yang tidak dapat dipisahkan dari *civil society* karena, LSM adalah tulang punggung masyarakat sipil yang kuat dan mandiri. Sementara penguatan *civil society* tanpanya bukanlah proses demokratisasi di Indonesia (Herdiansah, 2016).

Dalam pelaksanaan pembangunan, Indonesia telah menandatangani sebuah Millenium Development Goals (MDG's) yaitu deklarasi yang merupakan kesepakatan oleh perwakilan kepala negara dari 189 negara PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) pada bulan September tahun 2000 (Sulistyastuti, 2007). Pelaksanaan MDG's pada tahun 2015 mulai membentuk kemiskinan dan kelaparan, aspirasi pendidikan dasar bagi seluruh warga negara, kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, penurunan angka kematian anak, peningkatan kesehatan ibu, memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya dan dapat menjamin kelestarian lingkungan hidup dinegaranya (Brown, 2019).

Salah satu aktifitas pendampingan LSM terhadap masyarakat adalah bidang Kesehatan, karena kesehatan sangatlah penting bagi kehidupan suatu Negara. Penentu kualitas Sumber Daya Manusia adalah kesehatan. Selain itu didalam pembukaan UUD 1945 telah disebutkan salah satu tujuan Negara yaitu "Mensejahterakan Kehidupan Bangsa". Upaya yang dilakukan pemerintah untuk melakukan pembangunan sudah mulai dilakukan di beberapa daerah dengan berpedoman pada pelaksanaan MDG's, khususnya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang yaitu dengan Program Jambanisasi sebagai upaya untuk memerangi HIV/AIDS, malaria, diare dan penyakit menular lainnya. Diare merupakan salah satu masalah kesehatan terbesar di masyarakat Indonesia (Sulistyastuti, 2007). Pada tahun 2003, penyakit diare yang disebabkan oleh kontaminasi bakteri membunuh sekitar 100.000 nyawa dan merupakan salah satu alasan utama rawat inap di rumah sakit di Indonesia. Angka kematian akibat diare di Indonesia sekitar 3,5%. Hal ini menjadikan diare sebagai penyebab kematian ke 13 di segala usia. Namun diare merupakan penyebab utama kematian sebesar 31,4% pada anak usia 29 hari hingga usia 11 bulan. Sementara itu, 25% anak usia 1 tahun hingga umur 4 tahun meninggal karena diare yang berujung pada dehidrasi. (SINKARKES, 2015). Diare ternyata dapat berdampak fatal apabila penderita mengalami dehidrasi hebat akibat kehilangan banyak cairan dari tubuh. Maka dari itu, walaupun umum, diare tidak seharusnya dianggap enteng. Program ini sangat bagus dan bermanfaat bagi masyarakat dan dapat membantu pemerintah dalam melakukan pembangunan secara cepat dan tidak menunggu waktu yang lama. Peran LSM sangat membantu pemerintah dalam melaksanakan program-programnya, khususnya program jambanisasi di Kelurahan Jangli, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang.

Permasalahan program jambanisasi adalah banyaknya jamban yang ditinggalkan begitu saja di area tanah kosong, sehingga jamban yang seharusnya diberikan kepada warga justru tidak terpakai dan bahkan tidak sedikit pula jamban yang sudah rusak atau tidak layak digunakan lagi, khususnya yang terjadi di Kelurahan Jangli yang mendapatkan 97 jamban. Berdasarkan penjelasan permasalahan tersebut maka perlu

dilakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui sistem pelaksanaan program jambanisasi di Kelurahan Jangli dan akuntabilitas LSM terhadap program jambanisasi tersebut. Permasalahan pembangunan jambanisasi di Kelurahan Jangli perlu dikaji untuk melihat lebih dalam bagaimana sistem pelaksanaan program di Kelurahan Jangli dan bagaimana tanggung jawab LSM terhadap pembangunan jambanisasi tersebut.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Dimana metode penelitian deskriptif ialah penelitian yang menggambarkan dan bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan variabel yang diteliti. Sugiyono (2011) menyatakan bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk menentukan nilai variabel bebas, baik 1 (satu) variabel atau lebih, dan atau menentukan variabel bebas tanpa perbandingan atau hubungan dengan variabel lainnya.

Menurut Moelong (2012), deskriptif adalah data yang dikumpulkan dalam bentuk kata-kata dan gambar, bukan angka. Pernyataan ini menjelaskan bahwa pencarian deskriptif dalam penyajian ini adalah tentang berbagai kata, kalimat, atau gambar, bahkan dalam bentuk naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, atau catatan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, karena pada dasarnya penelitian ini menggambarkan dan menjelaskan permasalahan yang akan diteliti yaitu mengenai Akuntabilitas Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Terhadap Program Jambanisasi Di Kelurahan Jangli, Kota Semarang.

Sedangkan menurut Suharsaputra (2012) menyebutkan secara umum, penelitian kualitatif menghasilkan data berupa cerita deskriptif dalam bentuk kalimat yang ditulis atau diucapkan oleh orang atau perilaku sebagai informan yang dapat diamati untuk kemudian dijelaskan baik dari perspektif emic (perspektif subjek) dan etika. Sering diartikan sebagai prosedur pencarian yang perlu dilakukan (pandangan peneliti). Fokus utama dalam penelitian ini yaitu akuntabilitas dari LSM pada program Jambanisasi di Kelurahan Jangli, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang pada tahun 2018.

Dalam penelitian, sebuah data diperlukan karena sumber data adalah informasi yang memberikan gambaran lengkap mengenai ada atau tidaknya suatu masalah yang akan diteliti dalam penelitian tersebut. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan informan sebagai sumber informasi untuk mempersiapkan penelitian. Informan dipilih berdasarkan subjek yang memiliki informasi konkret tentang masalah yang sedang dipertimbangkan dan tersedia untuk memberikan data. Sedangkan, informan menurut Moelong (2012) adalah individu yang bekerja untuk memberikan informasi tentang situasi dan latar belakang suatu penelitian.

Dari penjelasan diatas dalam pengambilan sampel dalam penelitian kualitatif itu bertujuan dan tidak boleh acak. Ukuran sampel bersifat snowball ketika pencarian sedang berjalan, karena sampel dapat didasarkan pada informasi atau data yang perlu diperiksa pada tahap awal untuk menentukan informan utama.

Jumlah informan dalam sebuah penelitian kualitatif tidak tentu. Artinya, peneliti melakukan penggalan data dengan cara mewawancarai informan yang satu dengan informan yang lain sampai ditemukannya informasi terbaru. Dengan kata lain, jika pengumpulan data tidak menemukan variasi informasi, peneliti tidak perlu mencari banyak informan lagi karena sudah dianggap selesai menemukan jawaban dari penelitian ini.

Penelitian ini telah dilakukan pada bulan Juni hingga bulan Juli pada tahun 2018 di Kelurahan Jangli, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang. Dimana penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, dokumentasi serta observasi. Wawancara dilakukan kepada key informant dari masing-masing aktivitas untuk mendukung terjadinya perubahan kebijakan. Informan tersebut terdapat 1 (satu) orang Ketua LSM, 2 (dua) orang Koordinator Lapangan, 1 (satu) orang Ketua RT Kelurahan Jangli, 1 (satu) orang Warga Jangli sebagai penerima jamban yang sudah jadi dan 1 (satu) orang warga Jangli sebagai penerima jamban yang belum jadi. Teknik analisis datanya dengan metode deskriptif untuk merefleksikan hasil penelitian ini pada tataran sistem pelaksanaan, dan akuntabilitas LSM terhadap program jambanisasi di Kelurahan Jangli dengan pembuat kebijakan dalam upaya memperbaiki kebijakan tersebut.

### **Hasil dan Pembahasan**

Program jambanisasi pemerintah Kota Semarang terselenggara dengan bantuan LSM serta TNI AD pelaksana tugas. Program Jambanisasi dilaksanakan se-Kota Semarang pada awal tahun 2018 yaitu di Kelurahan Jangli, Sendangguwo, Meteseh, Tandang dan sekitarnya. Namun, program Jambanisasi belum berjalan maksimal dalam pelaksanaannya, hal ini dikarenakan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi terhambatnya pelaksanaan program ini dilapangan seperti cuaca yang dapat berubah-ubah, sumber daya manusia yang terbatas serta waktu. Hal ini dapat dilihat dimana banyak jamban yang ditinggalkan begitu saja di area tanah kosong, sehingga jamban yang seharusnya diberikan kepada warga justru malah tidak terpakai dan bahkan tidak sedikit pula jamban sampai rusak, khususnya terjadi di Kelurahan Jangli yang mendapatkan 97 jamban mulanya.

Menurut data, warga di Kelurahan Jangli yang belum memiliki Jamban yaitu sebanyak 97 Kepala Keluarga. Mereka telah diberi bantuan berupa sebuah plat dan WC. Pemberian tersebut dilakukan dengan bantuan diberikan pada setiap RT yang telah mendaftarkan siapa saja warga yang memang membutuhkan bantuan jamban tersebut. Program tersebut seharusnya dapat berjalan dengan lancar yaitu dengan terpenuhinya apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, selain itu program ini juga didukung dengan adanya bantuan dari TNI-AD dalam menggali lubang untuk pembuatan septic tank itu sendiri. Adapun rangkaian pelaksanaan program jambanisasi di Kelurahan Jangli diuraikan sebagai berikut.

Pertama, dilakukan sosialisasi kepada warga. Sosialisasi merupakan tahap penting yang harus dilakukan dalam program apapun yang akan dilakukan. Sosialisasi menentukan hasil pencapaian terbesar atas keberhasilan yang akan didapat. Sosialisasi terhadap program yaitu pemberian informasi dari pihak satu (LSM) ke pihak lainnya (masyarakat). Informasi tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman atas program jambanisasi yang akan dilakukan. Jika sosialisasi yang dilakukan salah atau kurang dalam penyampaiannya kepada warga maka hasil yang akan didapatkannya pun juga kurang maksimal, begitu pula sebaliknya. Sosialisasi program jambanisasi ini dilakukan oleh LSM dengan bantuan koordinator lapangan, babinsa, dan relawan. Sosialisasi dilakukan dengan pembekalan kepada warga mengenai hal-hal yang harus dilakukan oleh warga dalam program jambanisasi. Warga disuruh menyediakan tanah untuk penggalian. Apabila terdapat warga merasa tidak sanggup dan ingin dibantu oleh TNI maka pihak LSM akan menyediakan bantuan tersebut dengan mengerahkan para anggota TNI untuk membantu dalam proses penggalian. Sosialisasi dilakukan dibalai



Kelurahan Jangli dengan dihadirkan dari pihak LSM, Koordinator lapangan, Babinsa dan relawan serta warga yang turut hadir di dalamnya.

Kedua, Verifikasi data adalah pembentukan kebenaran teoritis, mengolah dan menganalisis fakta tentang data yang dikumpulkan sehingga dapat divalidasi secara hipotesis. Kemudian hipotesis diuji terhadap fakta empiris dan akan mendapatkan jawaban tentang kebenaran ilmiah. Verifikasi dilakukan oleh koordinator lapangan dengan relawan. Mereka mendatangi rumah warga secara satu per satu atau dengan mendatangi perwakilan dari warga seperti RT. Mereka meminta kepastian kepada warga bahwa apakah benar-benar warga membutuhkan jamban, setelah itu mereka mengecek kondisi rumah warga. Jika sudah siap mendapatkan bantuan dan kondisi rumah mendukung untuk adanya jambanisasi maka jamban akan dapat dikirim dengan tepat waktu. Data yang didapat haruslah sesuai dengan kondisi di lapangan, kevalidan data merupakan hal yang penting agar tidak terjadi penyelewengan terhadap program yang sudah direncanakan.

Ketiga, distribusi barang. Pendistribusian barang sebagai kegiatan pemasaran yang ditujukan untuk memperlancar dan mempermudah pemberian barang dan jasa dari produsen kepada konsumen, sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan (jenis, jumlah, total biaya, lokasi, dan barang yang dibutuhkan). Dalam hal ini distribusi barang dilakukan oleh pihak dari LSM dengan menggunakan jasa dari orang. Pendistribusian jamban diletakkan secara langsung di rumah warga bagi rumah yang mudah dijangkau oleh mobil pengangkut jamban. Pendistribusian juga dihadiri oleh koordinator lapangan, relawan serta perwakilan dari salah satu warga untuk penyerahan jamban.

Keempat, penggalian *septic tank*. Menggali *septic tank* adalah hal pertama yang harus dilakukan, karena perlu untuk mengetahui letak lubangnya terlebih dahulu. Menurut pakar kesehatan, tempat penampungan tinja berjarak minimal 10meter dari sumber air bersih yang berada dari rumah warga. Dua *septic tank* biasanya digunakan untuk penggalian. Penggunaan *septic tank* pertama adalah untuk mengisolasi feses yang keras, kemudian *septic tank* kedua berfungsi sebagai penyaring. Sebelum menggunakan *septic tank*, isi dengan air, yang akan berfungsi sebagai sarana untuk mencerna feses, dan dengan cepat menghancurkan feses. Penggalian *septic tank* dilakukan oleh LSM dengan pengerahan TNI AD bagi warga yang benar-benar membutuhkan bantuan, dimana bagi warga yang tidak memiliki tenaga lelaki untuk melakukan penggalian. Apabila warga masih mempunyai tenaga yang dapat diandalkan dalam proses penggalian. Di Jangli adanya bantuan yang dilakukan oleh TNI yaitu selama 2 (dua) hari. Selama penggalian juga dihadiri oleh koordinator lapangan, relawan serta perwakilan warga yang mengerti tentang siapa saja yang benar-benar mendapat bantuan jamban.

Kelima, evaluasi yang dilakukan LSM. Dimana Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam upaya untuk mengevaluasi program kerja yang telah dilaksanakan dan yang akan di programkan merupakan bagian evaluasi perjalanan organisasi yang membahas program apa saja yang sudah berjalan tahun ini dan apa yang akan dilakukan tahun depan. LSM dalam mengevaluasi keadaan di dalam masyarakat seharusnya berjalan dengan baik sesuai rencana. Evaluasi dilakukan oleh koordinator lapangan dan relawan dalam hal evaluasi apakah benar-benar jamban itu sudah diterima oleh masyarakat atau belum. Evaluasi ini ditanyakan kepada warga yang benar-benar menjadi perwakilan dari bantuan jamban tersebut.

Namun dari penelitian yang telah dilakukan ternyata keadaan tersebut berlawanan dengan harapan LSM dan masyarakat. Banyaknya plat dan jamban yang masih terbengkalai di pinggir jalan atau depan rumah warga. Ada juga ditemukan plat sebagai penutup got. Faktor belum maksimalnya akuntabilitas program jambanisasi:

1) Sosialisasi yang kurang maksimal

Sosialisasi yang dilakukan kurang maksimal sehingga munculnya suatu miss communication yang terjadi antara maksud LSM dengan pola pikir masyarakat. LSM sudah menerangkan apa yang seharusnya masyarakat lakukan dalam program jambanisasi dan barang apa saja yang akan diberikan kepada warga. Namun kenyataannya dari hasil penelitian ternyata masih ada juga masyarakat yang belum mengetahui bahwa barang yang akan diberikan kepada mereka yaitu barang jadi sebuah plat dan WC. Beberapa warga ada yang beranggapan bahwa mereka akan diberi bahan mentah dalam pembuatan jamban yaitu seperti barang-barang material (pasir, semen, batu batu, dan lain-lain). Dari pihak LSM menyatakan bahwa proses sosialisasi sudah benar dilakukan dimana LSM menyediakan waktu tanya jawab kepada warga tentang pembuatan jamban tersebut serta LSM juga sudah memberikan gambaran tentang pembuatan jamban kepada warga. Dari pernyataan tersebut ditemukan bahwa ternyata yang mengikuti sosialisasi, tidak hanya seseorang yang mempunyai kepentingan di dalamnya. Ada beberapa perwakilan yang datang untuk mewakili kerabat atau saudaranya terhadap program jambanisasi tersebut. Selain itu adanya persepsi masyarakat tentang bantuan yang diberikan oleh TNI AD, dimana TNI di sini dimaksudkan untuk membantu warga yang benar-benar membutuhkan tenaga. Warga yang benar-benar membutuhkan seperti nenek tua yang sudah tidak mempunyai lelaki di rumahnya selain itu seorang janda yang masih mempunyai anak kecil, dan lain-lain yang benar-benar membutuhkan. Namun warga menganggap bahwa TNI AD akan membantu sepenuhnya dalam proses penggalian. Tentunya hal ini diakibatkan adanya kesalahpahaman antara masyarakat dengan LSM.

2) Waktu pelaksanaan yang ditentukan dalam program jambanisasi

Waktu yang ditentuka dalam program jambanisasi yaitu sangat kurang dimana masih banyaknya jamban yang terbengkalai di rumah warga. Menurut ketua LSM bahwa program tersebut sudah harus diserahkan pada pemerintah bulan Desember padahal pelaksanaan yang dilakukan adalah bulan Januari untuk kelurahan Jangli. Keadaan tersebut sudah jelas sangat sempit dalam proses pembelian barang-barang yang akan dibagikan kepada warga. Selain itu dalam 97 warga, ada beberapa warga yang sama sekali belum digali oleh TNI, hal ini disebabkan karena jadwal yang sudah ditentukan sudah diatur dimana TNI selesai tidak selesai harus menyelesaikan penggalian kepada warga selama 2 hari di Kelurahan Jangli. Hal ini tentunya masih banyak warga yang belum mendapatkan galian yang dilakukan oleh TNI.

3) Medan area pemukiman warga di Kelurahan Jangli

Medan area pemukiman warga disini dimaksudkan bahwa tidak semua rumah warga Jangli mudah dilalui oleh mobil pengangkut yang bertugas untuk mengangkut plat dan WC dikarenakan jalan dilingkungan tersebut sangat sempit untuk dilalui oleh kendaraan besar, hanya muat dilalui oleh kendaraan bermotor saja. Kebanyakan milik warga yang telah menerima bantuan tersebut, dititipkan oleh rumah warga yang memiliki halaman kosong yang mampu untuk menampung jamban dalam beberapa waktu atau jamban ditempatkan di sebuah lapangan yang



mudah dijangkau oleh kendaraan besar. Dengan keadaan tersebut membuat warga merasa malas untuk mengambil barang-barang tersebut dengan tangan kosong, apalagi semua plat dan WC terbuat dari cor-coran semen sehingga sangat berat jika diambil oleh setiap individu.

- 4) Kondisi tanah yang dimiliki warga Kelurahan Jangli  
Kondisi tanah yang dimiliki warga dimaksudkan adalah bahwa kondisi tanah yang ada di Kelurahan Jangli tidak padat. Maksud dari tidak padat yaitu banyak tanah yang ada di rumah warga yang sangat subur dan mudah turun ke bawah. Dengan keadaan tersebut sangat tidak mungkin akan dipasang plat dan WC yang terbuat dari cor-coran semen. Hal tersebut akan mengakibatkan tanah yang dihuni warga akan ambles ke bawah.
- 5) Kurangnya SDM yang berkontribusi dan transportasi yang memadai  
Sudah dijelaskan bahwa tenaga dan transportasi sangatlah menunjang keberhasilan dalam program jambanisasi. Tenaga untuk membantu hanya didapat dari beberapa anggota TNI saja, peranan masyarakat di Kelurahan Jangli sangat kurang dalam program tersebut sehingga masih adanya jamban yang belum terselesaikan dipasang dikarenakan belum tersentuhnya galian yang dilakukan oleh anggota TNI tersebut. Transportasi juga sangat menentukan dari kesuksesan program ini. Transportasi yang digunakan pada kegiatan saat itu terdapat dua buah mobil pick-up saja.
- 6) Kurangnya partisipasi peran aktif dari masyarakat Kelurahan Jangli  
Peran aktif masyarakat dalam kesuksesan program jambanisasi juga merupakan faktor yang sangat penting. Adanya kontribusi para warga yang tinggi dari masyarakat dalam membuat jamban akan membantu dalam kesuksesan program ini, karena masyarakat akan turun serta atau aktif dalam pelaksanaannya. Meskipun tenaga yang dihadirkan oleh LSM kurang maksimal, hal itu akan tidak menjadi masalah ketika para warga berinisiatif sendiri untuk mengadakan gotong royong sendiri ketika libur kerja.

Pada dasarnya adanya ketidaksesuaian yang terjadi antara LSM dan masyarakat dapat ditangani oleh pemerintah karena bagaimanapun juga pemerintah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan program jambanisasi, khususnya di Kelurahan Jangli. Keadaan ini sangat bertentangan dengan salah satu teori yaitu teori *principal agent*. Teori *principal agent* mengadopsi konsep yang terdapat pada sektor swasta untuk menjelaskan munculnya perbedaan yang sering ditemukan dalam hal tujuan manager dengan pemegang saham yang dapat ditemukan pada berbagai organisasi atau perusahaan, baik itu dari pihak swasta maupun publik, profit maupun non-profit. Pada suatu perusahaan, biasanya sering terjadi situasi di mana pemegang saham menginginkan keuntungan setinggi-tingginya, sementara manajer menginginkan kerja yang longgar dan gaji yang tinggi (Gunawan, 2021).

Konsep agensi adalah konsep yang menggambarkan adanya hubungan kontraktual antara *principals* dan *agents*. *Principals* adalah pihak yang melibatkan pihak lain, dimana *agents* melakukan tugas yang diberikan oleh *principals*. Menurut Copeland and Weston (1992), mengemukakan bahwa teori keagenan sulit untuk mempercayai bahwa manajemen (*agents*) akan selalu bertindak berdasarkan pemegang saham (*principals*) sehingga diperlukan monitoring dari pemegang saham.

Jadi teori ini menyebutkan bahwa adanya hubungan antara pemegang saham terhadap manajemen tetapi tetap adanya kontrol yang dilakukan oleh pihak pemegang saham terhadap manajemen dalam mengelola mandat yang diberikannya. Adanya kontrol ini digunakan sebagai bentuk antisipasi jika adanya suatu penyalahgunaan yang dilakukan oleh manajemen dalam melaksanakan mandat.

Kejadian yang terjadi pada program jambanisasi tersebut sangat berlawanan dengan teori agensi di mana adanya kontrol yang dilakukan oleh pemerintah sangatlah penting dalam program tersebut. Meskipun evaluasi sudah dilakukan oleh pihak LSM, namun pemerintah juga harus melakukan pengontrolan terhadap kinerja LSM mengenai apakah LSM sudah melakukan tugas dengan benar atau tidak. Pihak LSM juga seharusnya melakukan perbaikan untuk program-program selanjutnya. Perbaikan program tersebut dapat dilihat dari evaluasi yang dilakukan oleh para koordinator lapangan. Program jambanisasi tersebut seakan-akan pemerintah sudah lepas tangan terhadap program yang sudah dilakukan.

Dalam masalah ini biasanya, para pemegang saham akan berusaha melakukan kontrol yang intens terhadap kinerja manajer, mengambil alih perusahaan atau bahkan memecat sang manajer dalam situasi yang darurat sekalipun. Salah satu cara yang digunakan untuk pemantauan dan pembatasan penerapan strategi corporate governance dalam sengketa kontrak. Prinsip-prinsip pokok tentang corporate governance yang perlu diperhatikan untuk terselenggaranya praktik *good corporate governance* adalah dengan menerapkan; transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), keadilan (*fairness*), dan tanggung jawab (*responsibility*).

1. Transparansi (*Transparency*).

Untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang relevan dan material dengan cara yang mudah untuk diakses dan dipahami oleh pihak yang berkepentingan. Perusahaan harus berinisiatif untuk menjelaskan tidak hanya isu-isu yang menjadi syarat oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga isu-isu yang berkaitan dengan proses pengambilan keputusan dari pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.

2. Akuntabilitas (*Accountability*).

Perusahaan dapat menyatakan kebijakan mereka secara jelas dan transparan. Untuk itu perusahaan harus dijalankan secara adil, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan memperhatikan kepentingan pemegang saham dan tatanan lainnya. Akuntabilitas adalah prasyarat yang diperlukan untuk kesuksesan yang berkelanjutan.

3. Tanggung jawab (*Responsibility*).

Perusahaan harus mematuhi undang-undang dan peraturan yang ada serta bertanggung jawab kepada masyarakat dan lingkungan untuk menjaga keberlangsungan bisnis dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.

4. Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*).

Kewajaran dan kesetaraan dalam menjalankan usaha, perusahaan harus memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya sesuai dengan prinsip kewajaran dan kesetaraan.

Prinsip-prinsip ini kemudian dicoba untuk diterapkan dalam institusi publik, dimana rakyat (dianggap sebagai *shareholder*) harus bisa melakukan kontrol yang intensif terhadap pemerintah (sebagai *manager/agent*). Pelaksanaan kegiatan-kegiatan

pemerintah harus dianggap sebagai kegiatan yang bisa diborongkan, dan institusi pemerintahan dibentuk seperti pemborong. Hal ini memunculkan pemikiran bahwa kegiatan pemerintah harus dilakukan dengan model *contracting out*, dan lembaga pemerintah tidak boleh bersifat permanen. Dengan cara ini, warga dapat mengontrol pemerintah secara efektif, dan mereka dapat mengambil alih dan memecat instansi tersebut jika mereka merasa tidak dapat diandalkan dalam mengevaluasi pekerjaan pemerintah. Pemerintah harus menjalin komunikasi yang aktif dengan masyarakat dalam menyelesaikan pembangunan, khususnya menyampaikan hak dan kewajiban masyarakat dalam proses pembangunan. Lalu melakukan pengawasan secara langsung terhadap pelaksanaan program jambanisasi yang dilakukan oleh LSM dan melakukan rutin evaluasi terhadap hasil dari program tersebut sehingga dapat dijadikan pedoman untuk pemerintah dalam melakukan program-program pembangunan selanjutnya. Dari pihak LSM hendaknya melakukan koordinasi kepada Pemerintah lebih dalam mengenai kendala-kendala yang terjadi di lapangan serta seharusnya LSM melakukan penindaklanjutan atas evaluasi yang terjadi di lapangan, kemudian masyarakat hendaknya berupaya berperan aktif dalam program jambanisasi yaitu berinisiatif mengadakan gotong royong pada saat libur kerja sehingga dapat membantu LSM dan anggota TNI yang kekurangan tenaga.

### **Simpulan**

Adanya berbagai masalah dalam pelaksanaan program jambanisasi mempunyai dampak yang sangat besar terhadap kesuksesan program tersebut. Berdasarkan hasil wawancara, observasi serta analisis data maka dapat disimpulkan bahwa sebenarnya memiliki tujuan yang baik dengan mengadakan program jambanisasi yang belum tentu dilakukan oleh pemerintah dalam hal pembangunan. Program tersebut tentunya akan membawa dampak positif kepada masyarakat baik dalam hal kesehatan maupun kebersihan lingkungan. Namun pada dasarnya sesuatu yang telah direncanakan tidak dapat sesuai dengan apa yang telah diharapkan baik dari pihak LSM maupun dari masyarakatnya sendiri. Adanya berbagai masalah dalam pelaksanaan program jambanisasi mempunyai dampak yang sangat besar terhadap kesuksesan program tersebut. Maka dari itu, akuntabilitas LSM terhadap program jambanisasi di Kelurahan Jangli dapat dikatakan belum maksimal. penyebab kurang maksimalnya program jambanisasi baik berasal dari LSM, masyarakat maupun dari pemerintah itu sendiri. Kurang adanya komunikasi yang baik atau terjadinya miss-communication diantara LSM, masyarakat serta pemerintah dan kurang aktifnya dari warga Kelurahan Jangli juga merupakan salah satu faktor penghambat terbesar dalam penentuan kesuksesan program jambanisasi ini. Pemahaman dari masyarakat akan arti pentingnya sebuah partisipasi itu masih tergolong rendah, hal ini dikarenakan masyarakat masih lebih mengutamakan kesibukan masing-masing.

Kondisi tersebut dapat dilihat dari hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan dimana menggambarkan banyaknya jamban yang hingga sekarang masih terbengkalai. Kejadian yang terjadi pada program jambanisasi ini meskipun evaluasi sudah dilakukan oleh pihak LSM, namun pemerintah juga harus melakukan pengontrolan terhadap kinerja LSM mengenai apakah LSM sudah melakukan tugas dengan benar atau tidak. Pihak LSM juga seharusnya melakukan perbaikan untuk program-program selanjutnya. Perbaikan program tersebut dapat dilihat dari evaluasi

yang dilakukan oleh para koordinator lapangan. Program jambanisasi tersebut seakan-akan pemerintah sudah lepas tangan terhadap program yang sudah dilakukan.

### Daftar Pustaka

- Asnar, A. (2016). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir Samarinda. *Gulawentah: Jurnal Studi Sosial*, 1(2), 121-131. <https://doi.org/http://doi.org/10.25273/gulawentah.v1i2.1035>
- Brown, G. (2019). Civic Islam: Muhammadiyah, NU and the Organisational Logic of Consensus-making in Indonesia. *Asian Studies Review*, 43(3), 397-414. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/10357823.2019.1626802>
- Copeland, T. E., & Weston, J. F. F. (1992). *Corporate Policy*. Addison Wesley Publishing Company.
- Gaffar, A. (2002). *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*. Pustaka Pelajar.
- Gunawan, R. M. B. (2021). *GRC (Good Governance, Risk Management, And Compliance)-Rajawali Pers*. PT. RajaGrafindo Persada.
- Herdiansah, A. G. (2016). Peran organisasi masyarakat (Ormas) dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam menopang pembangunan di Indonesia. *Sosioglobal: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi*, 1(1), 49-67. <https://doi.org/https://doi.org/10.24198/jsg.v1i1.11185>
- Hikam, M. A., & Magnis-Suseno, F. (1996). *Demokrasi dan civil society*. Lp3es Jakarta.
- Moelong, L. J. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosda Karya.
- Noviantoro, B., & Nugroho, P. I. (2019). Fenomena Akuntabilitas Terhadap Pendanaan Lembaga Swadaya Masyarakat. *AFRE (Accounting and Financial Review)*, 2(2), 133-141. <https://doi.org/https://doi.org/10.26905/afr.v2i2.3671>
- Sugiyono, S. (2011). *Metode Penelitian Administrasi*. Alfabeta.
- Suharsaputra, U. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*. . Refika Aditama.
- Sulistiyastuti, D. R. (2007). Pembangunan Pendidikan dan MDGs di Indonesia Sebuah Refleksi Kritis. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 2(2), 19-44. <http://ejurnal.kependudukan.lipi.go.id/index.php/jki/article/download/146/179>
- Unerman, J. (2000). Methodological issues-Reflections on quantification in corporate social reporting content analysis. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*. <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/09513570010353756>